KEBEBASAN BERBICARA DAN BERPIKIR

Oleh Nurcholish Madjid

Peringatan untuk kesekian kalinya telah dikeluarkan oleh Pemerintah tentang adanya kegiatan-kegiatan dari sementara golongan yang hendak mengubah UUD 45 dan Pancasila. Yang terakhir ialah sinyalemen yang dinyatakan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal M. Panggabean. Malahan dalam sinyalemen itu secara eksplisit disebutkan pula peranan bekas partai-partai terlarang selain PKI, hal mana sedikit menimbulkan asosiasi atau "kenangan" akan salah satu yel politik masa lalu.

Tetapi adanya peringatan serupa itu kiranya memang diperlukan, dan kiranya juga proporsional. Sekalipun tentu tidak dimaksudkan untuk mengadakan sakralisasi terhadap UUD 45 dan Pancasila sehingga menjadi setingkat dengan agama, namun tetap diperlukan adanya keteguhan sejauh mungkin di dalam mempertahankan dan menjalankannya. Pancasila dan UUD 45 bukan saja merupakan sebegitu jauh hasil terbaik pemikiran dan penemuan bersama bangsa Indonesia secara keseluruhan, tetapi juga telah terbukti kemampuannya menghimpun seluruh unsur bangsa di bawah satu bendera, dengan "ongkos-ongkos" yang tidak terlalu mahal sebagaimana dialami oleh beberapa bangsa lain. Apalagi jika diingat bahwa unsur-unsur kebangsaan kita adalah termasuk yang paling beragam-corak atau heterogen di dunia ini.

Oleh sebab itu, usaha mengubah nilai-nilai dasar itu akan membuat keseluruhan bangsa memulai proses integrasinya lagi

dari bawah. Ini adalah menyia-nyiakan waktu dan tenaga yang amat berharga untuk tujuan-tujuan lain, misalnya pembangunan. Dan jika sekali dasar tersebut telah berhasil diubah, maka apa yang akan menjamin bahwa yang baru itu pun akan tidak diubah lagi? Dan jika hal itu terjadi dengan korban-korban sia-sia yang tentu menyertainya, maka kapan proses akan berhenti dan negara memulai dengan sungguh-sungguh mewujudkan tugas dan cita-citanya yaitu menciptakan kebahagiaan lahir maupun batin untuk warganya?

Dengan pendekatan dari segi kemanusiaan yang wajar dapatlah kita mengatakan bahwa di balik usaha mengubah UUD 45 dan Pancasila — kalau benar-benar ada — tidak mustahil terdapat cita-cita yang cukup ikhlas, murni dan bersifat altruistis karena didorong oleh keinginan yang tinggi untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi umum, lebih-lebih rakyat banyak. Tetapi sebetulnya cita-cita dan pikiran-pikiran itu tetap dapat disalurkan serta diperjuangkan melalui UUD 45 dan Pancasila. Sebab, sebagaimana sering dikemukakan orang, konstitusi dan falsafah kita itu adalah sangat luwes, dan keluwesan itulah yang menjadi titik kekuatannya. Dalam keadaan itu berarti nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menuntut segi pelaksanaan yang diriamis, *ever changing*, sesuai dengan keadaan pada masa tertentu. Ini adalah sesuai sekali dengan perkembangan ideologi yang mutakhir. Sebagai contoh ialah apa yang dikatakan oleh Willy Eichler (almarhum), salah seorang pemikir partai sosial-demokrat Jerman atau SPD, bahwa kini bukan zamannya lagi untuk memahami suatu nilai politik seperti demokrasi dan sosialisme secara ideologi dan dogmatis. Demokrasi umpamanya tidak dapat dipahami melalui perumusan-perumusan yang sekali dibuat kemudian berlaku untuk selama-lamanya dan mutlak, melainkan harus ditafsirkan secara dinamis, sehingga demokrasi adalah berarti proses demokratisasi, yaitu keadaan yang memungkinkan semakin diperbesarnya kebebasan-kebebasan kemanusiaan secara konsisten. Demikian juga dengan sosialisme.

Hanya saja dalam hal Pancasila itu, yang dulu di masa Orla (tapi cukup dapat dibenarkan) dikatakan sebagai pengangkatan nilai-nilai "*Declaration of Independence*"-nya Amerika dan "Manifesto Komunis"-nya Rusia bersama-sama setingkat lebih tinggi, setiap pikiran dituntut konsistensinya dan cakupannya dengan keseluruhan nilai itu tanpa kecuali. PKI umpamanya sebegitu jauh mengaku sebagai pejuang kerakyatan dan keadilan sosial yang paling gigih. Tetapi dapat dipastikan bahwa ia mengingkari Ketuhanan Yang Maha Esa. Mungkin mereka juga acuh-tak-acuh terhadap nilai perikemanusiaan, melihat bagaimana cara yang mereka tempuh dalam memperjuangkan cita-cita mereka, antara lain Gestapu. Dan barangkali ada kelompok dalam masyarakat yang memberi perhatian hanya salah satu atau sebagian saja dari Pancasila itu.

Karena sifatnya yang dinamis, maka Pancasila harus diperjuangkan dalam watak dan proses masyarakat yang dinamis pula. Di sini terletak arti pentingnya kebebasan-kebebasan asasi, khususnya kebebasan menyatakan pendapat dan pikiran. Lebih-lebih untuk forum ilmiah dan legislatif. Berarti bahwa selain universitas harus berfungsi penuh, demikian pula DPR, saluran resmi suara rakyat kita. [❖]